



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

**RENCANA STRATEGIS DEPUTI
BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN
PUSTAKA DAN JASA INFORMASI
2020 -2024**



**RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN
PERPUSTAKAN DAN JASA INFORMASI TAHUN
2020-2024**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi untuk periode 5 (lima) tahun 2020-2024.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden, penyusunan dokumen Renstra ini didasarkan pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
3. Rencana Strategis Perpustakaan Nasional tahun 2020-2024; dan
4. Dokumen pendukung lainnya.

Dengan ditetapkannya Renstra Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Tahun 2020-2024 diharapkan Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi dapat lebih mengerahkan segala daya upaya dan sumber daya yang ada untuk mewujudkan pencapaian Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional “*Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca*”, khususnya dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Prima melalui Pengembangan Bahan Perpustakaan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan.

Jakarta, November 2020

Deputy Bidang Pengembangan Bahan
Pustaka dan Jasa Informasi



[Handwritten Signature]
Ofy Sofiana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Capaian Renstra Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi 2015-2019	3
1.5. Potensi dan Permasalahan.....	10
1.5.1. Potensi.....	10
1.5.2. Permasalahan	15
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI	21
2.1. Visi Perpustakaan Nasional	21
2.2. Misi Perpustakaan Nasional.....	21
2.3. Tujuan Pembangunan Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi	21
2.4. Sasaran Strategis Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi	22
2.5. Peta Strategis Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi ...	22
2.6. Sasaran Strategis Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi	23

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA REGULASI	26
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Perpustakaan Nasional	26
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi.....	27
3.3. Kerangka Regulasi	28
 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	29
4.1. Target Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi	29
4.2. Kerangka Pendanaan.....	33
 BAB V PENUTUP	34
 Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi.....	36
Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi	39

Daftar Tabel

Tabel 1 Penambahan Koleksi Nasional	4
Tabel 2 . Realisasi Peningkatan Pemustaka	6
Tabel 3 . Peningkatan Perpustakaan Yang Tergabung Jejaring Nasional.....	7
Tabel 4 Presentase Peningkatan KCKR.....	8
Tabel 5 . Presentase Pelestarian Fisik dan Informasi.....	9
Tabel 6 . Presentase Pengawasan Bibliografi Indonesia.....	10
Tabel 7 Jumlah Koleksi Khastara per 7 Desember 2020	14
Tabel 8 . Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan	29
Tabel 9 . Alokasi Anggaran Perpunas Berdasarkan Program	33

Daftar Gambar

Gambar 1 . Struktur Organisasi.....	3
Gambar 2 . Tampilan Corona Pedia.....	11
Gambar 3 . Tampilan <i>Books in Prints</i>	13
Gambar 4 . Tampilan Khastara	14
Gambar 5 . Widget Tanya Putakawan Virtual	15
Gambar 6 . Sebaran Pelestarian Naskah Daerah per 2019.....	19
Gambar 7 . SS1 Terwujudnya Layanan Prima, Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno	22

Daftar Grafik

Grafik 1 . Peningkatan Pemustaka	6
Grafik 2 . Peningkatan Penerimaan KCKR	8
Grafik 3 Capaian ISBN 2012-2020.....	12
Grafik 4 . Perbandingan Potensi Terbitan dan Pelaksanaan Kewajiban UU SS KCKR.....	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) merupakan lembaga pemerintah non kementerian (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tersebut, Perpusnas mengemban beberapa fungsi penting yaitu:

1. Perpustakaan Pembina dengan mengembangkan semua jenis perpustakaan sesuai standar.
2. Perpustakaan Rujukan dengan menyediakan referensi semua bidang ilmu pengetahuan.
3. Perpustakaan Penelitian dengan menyediakan fasilitas penelitian berbagai subjek ilmu pengetahuan.
4. Perpustakaan Deposit dengan menghimpun dan melestarikan semua karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik Indonesia.
5. Pusat Jejaring Perpustakaan dengan bekerja sama antar perpustakaan dan lembaga lainnya untuk membangun repositori ilmu pengetahuan Indonesia.
6. Perpustakaan Pelestarian dengan melestarikan khasanah intelektual dan budaya bangsa Indonesia dalam bentuk bahan perpustakaan .

Selanjutnya, Perpusnas memiliki peran sentral dalam upaya memperkuat koleksi nasional, di antaranya dengan mengoptimalkan penghimpunan karya cetak dan karya rekam sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR), serta melaksanakan pengembangan koleksi Perpusnas yang bertujuan untuk menyediakan koleksi yang komprehensif dan mutakhir bagi pemustaka.

Perpusnas juga mempunyai peran pelestarian kebudayaan. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Program Perpusnas dalam menjalankan amanah tersebut dijalankan melalui proses pelestarian dan perlindungan warisan budaya berupa melakukan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi terhadap objek pemajuan kebudayaan yang salah satunya adalah manuskrip (naskah kuno nusantara) tertuang pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tersebut.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan bahan perpustakaan dan jasa informasi. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi menyelenggarakan fungsi:

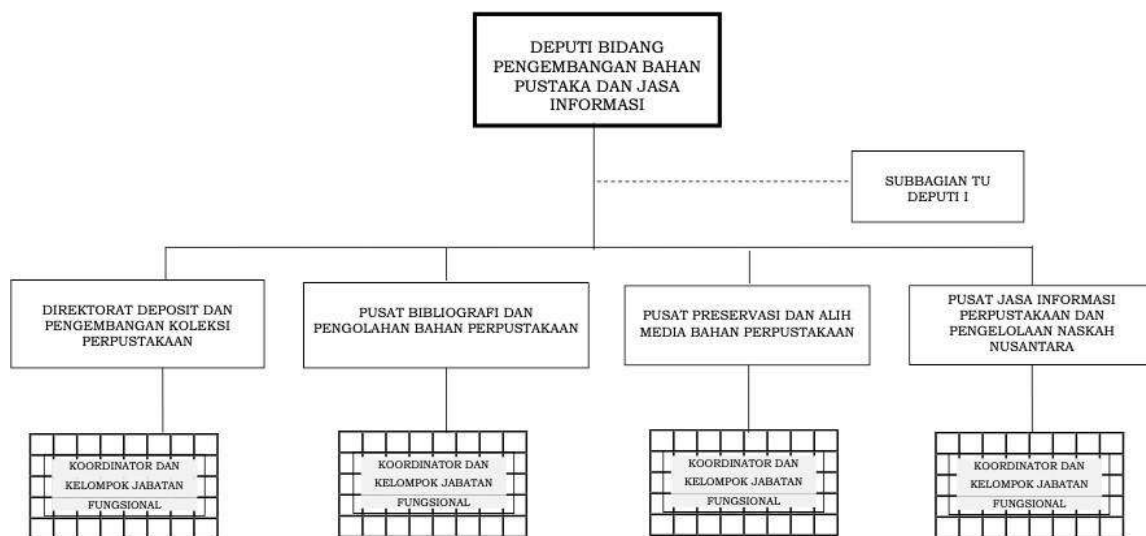
- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengembangan bahan perpustakaan dan jasa informasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan bahan perpustakaan dan jasa informasi pengendalian terhadap kebijakan teknis sesuai dengan bidang pengembangan bahan perpustakaan dan jasa informasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan bahan perpustakaan dan jasa informasi;
- d. pelaksanaan fasilitasi di bidang pengembangan bahan perpustakaan dan jasa informasi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan bahan perpustakaan dan jasa informasi;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan;
- b. Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
- c. Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan;
- d. Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara.

1.3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi dari Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi

1.4. Capaian Renstra Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi 2015-2019

Capaian Renstra Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi merupakan analisis dari proses pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 2015-2019. Adapun rincian dari kegiatan di Kedeputian ini adalah sebagai berikut :

1. Penambahan Koleksi Nasional Yang Lengkap

Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi bertugas untuk menjamin pertambahan koleksi nasional sebagai unsur utama layanan perpustakaan dalam pemenuhan kebutuhan informasi dan pengetahuan pemustaka serta untuk mengetahui pertumbuhan koleksi Perpustakaan Nasional. Koleksi yang diadakan harus sesuai dengan visi dan misi Perpustakaan Nasional, meliputi bahan perpustakaan yang terbit baik di dalam maupun di luar negeri serta diproduksi baik dalam bentuk analog maupun digital. Jenis bahan perpustakaan yang diadakan antara lain adalah monograf, bahan kartografis, audio visual, serial, dan manuskrip /naskah kuno.

Tabel 1 Penambahan Koleksi Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase penambahan koleksi nasional yang lengkap	10,04	14,47	15,54	41,94	49,75
Jumlah penambahan koleksi (eksemplar)	250.886	361.657	386.185	1.048.623	1.243.760

Target akhir penambahan koleksi yang lengkap dan mutakhir pada Renstra 2015-2019 adalah sebesar 2.500.000 eksemplar yang merupakan akumulasi dari pengadaan koleksi setiap tahun dalam periode Renstra. Akumulasi dari realisasi capaian penambahan koleksi tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 3.291.111 eksemplar. Jumlah tersebut secara signifikan telah melebihi target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 131,64%.

Ketersediaan koleksi perpustakaan merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan perpustakaan. Koleksi merupakan salah satu kekuatan dan daya tarik utama bagi pemustaka untuk memanfaatkan layanan perpustakaan. Tanpa adanya koleksi secara memadai dalam hal kuantitas dan kualitas, perpustakaan tidak akan mampu menyediakan layanan yang optimal bagi pemustakanya.

Salah satu bahan perpustakaan yang mendapatkan perhatian khusus dalam pengembangan koleksi adalah naskah kuno nusantara. Naskah kuno nusantara merupakan warisan dokumenter bangsa yang bersifat unik karena ditulis tangan dengan menggunakan media, aksara, dan bahasa tradisional atau bahasa daerah dan termasuk dalam benda cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya.

Sebagai sumber sejarah, naskah kuno nusantara memberikan sumbangan yang amat besar bagi sejarah kebudayaan bangsa Indonesia dan memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk belajar dari segala catatan sejarah yang terkandung di dalamnya. Dalam banyak kasus, kearifan lokal yang terkandung dalam teks naskah kuno nusantara tersebut dapat menjadi alternatif solusi yang relevan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masa kini, seperti masalah yang berkaitan dengan agama, pangan dan pertanian, *gender*, kesehatan, hukum, arsitektur, permukiman, dan lain-lain. Kearifan lokal tersebut juga dapat menuntun masyarakat Indonesia untuk bersifat toleran dan menghargai keberagaman, memiliki etika dan sopan-santun, memiliki etos kerja dan jiwa kepemimpinan, serta mengutamakan semangat gotong-royong yang sesuai dengan karakter bangsa.

Saat ini keberadaan naskah kuno nusantara masih tersebar di berbagai wilayah, baik dalam maupun luar negeri. Perpustakaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Perpustakaan telah melakukan berbagai upaya dalam mengidentifikasi dan mengadakan naskah kuno nusantara dalam rangka melestarikan fisik dan kandungan informasinya sehingga dapat diakses oleh generasi kini dan mendatang.

Sampai dengan tahun 2019, koleksi naskah kuno nusantara yang dimiliki oleh Perpustakaan berjumlah tidak kurang dari 12.161 eksemplar. Dalam rentang waktu lima tahun terakhir selama periode Renstra 2015-2019, Perpustakaan berhasil menambah koleksi naskah kuno nusantara sejumlah 1.404 eksemplar. Naskah kuno tersebut diperoleh melalui proses identifikasi keberadaan naskah kuno yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Informasi mengenai keberadaan tersebut diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya instansi pemerintahan setempat, komunitas pemerhati naskah seperti Manassa (Masyarakat Pernaskahan Nusantara), dan juga masyarakat yang memiliki naskah kuno.

2. Peningkatan Pemustaka

Salah satu indikator tingginya minat baca masyarakat suatu bangsa antara lain dapat dilihat melalui minat masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan. Pengguna perpustakaan baik perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 disebut dengan istilah pemustaka. Pemanfaatan fasilitas ini dapat dilakukan secara langsung (*onsite*) maupun secara tidak langsung melalui jaringan internet (*online*). Dalam rangka mencapai visi Perpustakaan, yaitu “Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca Dengan Memberdayakan Perpustakaan”, berbagai upaya pemberdayaan perpustakaan perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang memanfaatkan layanan perpustakaan.

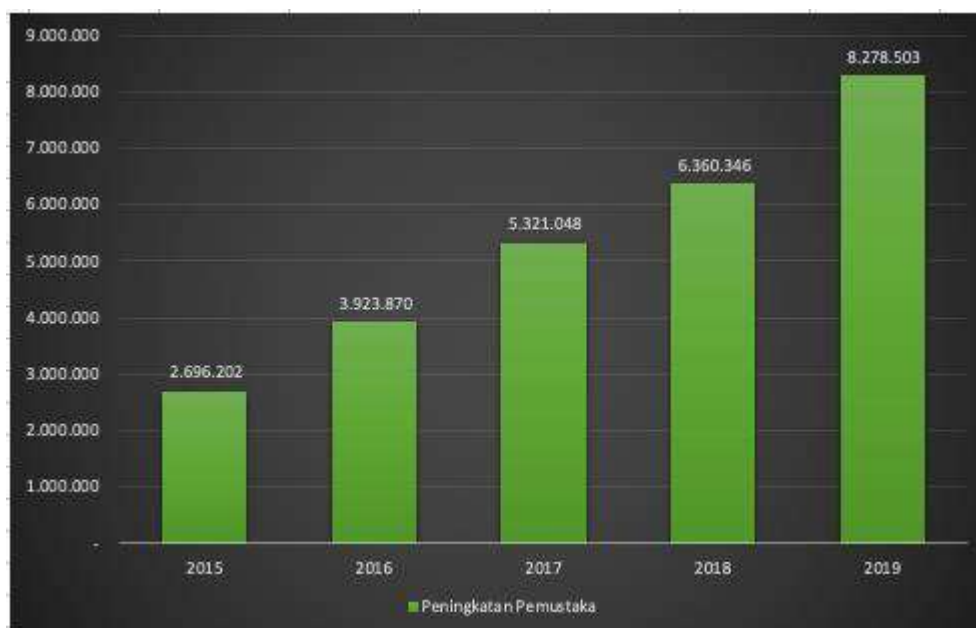
Realisasi jumlah pemustaka yang memanfaatkan layanan perpustakaan pada tahun 2015 sebanyak 2.696.202 orang dengan realisasi peningkatan pemustaka 44,39%, tahun 2016 realisasi jumlah pemustaka sebanyak 3.923.870 orang dengan realisasi peningkatan pemustaka 45.53%, tahun 2017 realisasi jumlah pemustaka sebanyak 5.321.048 orang dengan realisasi peningkatan pemustaka 34,54%, tahun 2018 realisasi jumlah pemustaka sebanyak 6.360.346 orang dengan realisasi peningkatan pemustaka 21,62%, dan tahun 2019 realisasi jumlah pemustaka sebanyak 8.278.503 orang dengan realisasi peningkatan pemustaka 30,16%. Dengan demikian, realisasi jumlah pemustaka yang memanfaatkan layanan perpustakaan mengalami kenaikan sebesar 343,31% dari baseline awal tahun rencana strategis.

Berikut ini adalah tabel perbandingan antara realisasi indikator kinerja pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan tahun 2015 s.d. 2019:

Tabel 2. Realisasi Peningkatan Pemustaka

Indikator Kinerja	Realisasi				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase peningkatan pemustaka	44,39	45,53	32,93	21,94	30,16
Jumlah pemustaka	2.696.202	3.923.870	5.321.048	6.360.346	8.278.503

Adapun peningkatan pemustaka dapat terlihat pula dalam grafik berikut ini :



Grafik 1. Peningkatan Pemustaka

3. Peningkatan Perpustakaan Yang Tergabung dalam Jejaring Nasional Perpustakaan

Indikator kinerja ini adalah bentuk perwujudan fungsi Perpunas sebagai pusat jejaring perpustakaan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Jejaring perpustakaan akan menjamin tersedianya layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menyediakan berbagai sumber daya, termasuk staf yang mampu melakukan pekerjaan menyeleksi, menata, menyediakan akses intelektual, menginterpretasikan, mendistribusikan, melestarikan keutuhan koleksi berformat digital, termasuk memastikan ketersediaannya dari waktu ke waktu, agar dapat diakses secara mudah oleh pemustaka. Bentuk pengukuran layanan perpustakaan berbasis TIK ini adalah jumlah perpustakaan yang dibantu oleh Perpunas dalam aspek koleksi, perangkat keras dan lunak, dan pelatihan sumber daya manusia.

Jumlah perpustakaan di Indonesia adalah 154.359 perpustakaan (termasuk Perpunas). Target akhir Renstra 2019 adalah presentasi peningkatan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan sebesar 1,1% dari 154.359 perpustakaan yang ada di Indonesia atau sebesar 1.698 perpustakaan. Persentase capaian sampai dengan tahun 2019 sebesar 1,77% atau sejumlah 2.732 perpustakaan. Dengan demikian jumlah capaian ini sudah mencapai lebih dari 100% (160,90%) dari target akhir tahun Renstra.

Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi kinerja IKU 3 tahun 2015 s.d. 2019, dengan target akhir tahun Renstra 2019:

Tabel 3. Peningkatan Perpustakaan Yang Tergabung Jejaring Nasional

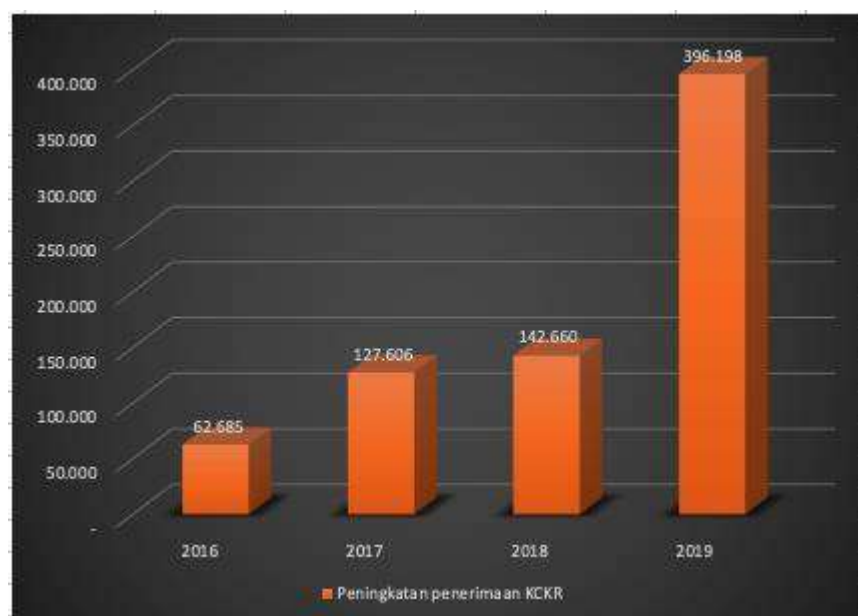
Indikator Kinerja	Realisasi				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase peningkatan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	-	0,33	0,54	0,82	1,77
Jumlah perpustakaan yang tergabung	-	514	828	1.265	2.732

4. Persentase Peningkatan KCKR

Meningkatnya penerimaan serah simpan KCKR merupakan salah satu indikator keberhasilan atau kegagalan bagi pelestarian khazanah budaya bangsa. Pengelolaan koleksi deposit berkontribusi dalam menjaga kumpulan kekayaan akal-budi, pengetahuan, dan budaya bangsa untuk tetap hidup dan bermanfaat bagi masyarakat masa kini dan masa yang akan datang.

Tabel 4. Persentase Peningkatan KCKR

Indikator Kinerja	Realisasi				
	1990-2015	2016	2017	2018	2019
Persentase peningkatan penerimaan KCKR	*tidak diukur	24	51	62	181
Penerimaan KCKR (eksemplar)	966.465	62.685	127.606	142.660	396.198



Grafik 2. Peningkatan Penerimaan KCKR

Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2018 sebesar 142.660 eks. dan realisasi capaian tahun 2019 sebesar 396.198 eks, diperoleh kesimpulan bahwa indikator capaian kinerja tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar 177.7% jika mengacu realisasi tahun sebelumnya. Tingkat capaian Direktorat Deposit Bahan Pustaka pada tahun 2019 terhadap penghimpunan serah simpan KCKR sudah menunjukkan bahwa penghimpunan karya rekam atau karya elektronik mengalami kemajuan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Meningkatnya capaian IKU ini karena adanya inovasi dan terobosan formulasi kegiatan dalam meningkatkan kepatuhan para wajib serah terhadap penyerahan hasil karya cetak dan karya rekam serta implementasi peran aplikasi e-deposit dalam penghimpunan karya rekam/digital bagi para wajib serah.

5. Persentase Pelestarian Fisik dan Informasi Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perpustakaan bahwa Perpustakaan Nasional RI sebagai wahana pelestarian kekayaan khasanah budaya bangsa melaksanakan amanah pelestarian yang berkaitan dengan bahan perpustakaan Indonesia baik fisik, informasi dan pengetahuan. Pelaksanaan upaya pelestarian tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun juga oleh masyarakat yang tertuang dalam (1) pasal 6 dimana masyarakat berkewajiban menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan serta menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional. Sedangkan pemerintah memiliki kewajiban dan wewenang yang tertuang dalam (2) pasal 7; menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia) dan (3) pasal 9; mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Tabel 5. Presentase Pelestarian Fisik dan Informasi

Indikator Kinerja	Realisasi				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase pelestarian fisik dan informasi bahan perpustakaan dan naskah kuno	10,2	9,2	14,5	10,7	22,8
Jumlah pelestarian fisik dan informasi bahan perpustakaan dan naskah kuno	-	-	56.150	43.948	88.728

Realisasi indikator kinerja pelestarian pada tahun 2019 sebesar sebanyak 88.728 eksemplar atau 22,8% dengan penetapan target IKU pada Renstra 2015-2019 perubahan sebesar 69.750 eksemplar atau 17% sehingga hanya diperoleh nilai capaian 127%. Tercapainya target yang diharapkan, bahkan melampaui pencapaian yang di atas 100% dikarenakan adanya kematangan pelaksanaan program pelestarian yang dijalankan.

6. Pengawasan Bibliografi Nasional

Pengawasan bibliografi adalah kegiatan dalam upaya pengembangan dan pengendalian sistem pencatatan untuk semua bentuk informasi dalam karya cetak dan karya rekam maupun bentuk lain, yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, dengan tujuan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan informasi dengan tujuan akhir adalah untuk menyediakan sarana akses yang efektif bagi pengguna dan memudahkan temu kembali informasi atau

dokumen tersebut. Meningkatnya persentase pengawasan bibliografi adalah salah satu indikator berhasil atau kegagalan dari terselenggaranya pengawasan bibliografi nasional.

Tabel 6. Presentase Pengawasan Bibliografi Indonesia

Indikator Kinerja	Realisasi				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase pengawasan bibliografi Indonesia	-	66,95	54,94	80	81,94
Jumlah pengawasan bibliografi Indonesia	-	3.401	4.520	4.284	4.509

Berdasarkan target IKU yang ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 perubahan sebesar 100% setiap tahunnya dan berdasarkan database layanan ISBN terkait jumlah wajib serah yang menerbitkan koleksi monografi pada tahun 2019 sebanyak 5.503 wajib serah, dan wajib serah yang melaksanakan kewajibannya terhadap amanat UndangUndang serah simpan karya cetak dan karya rekam diperoleh nilai capaian sebesar 81,94% atau 4.509 wajib serah.

1.5. Potensi dan Permasalahan

1.5.1. Potensi

Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi mengembangkan dan mengelola inovasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan potensi yang terus perlu dikembangkan agar menjadi maksimal pemanfaatannya. Adapun potensi yang telah dilakukan adalah :

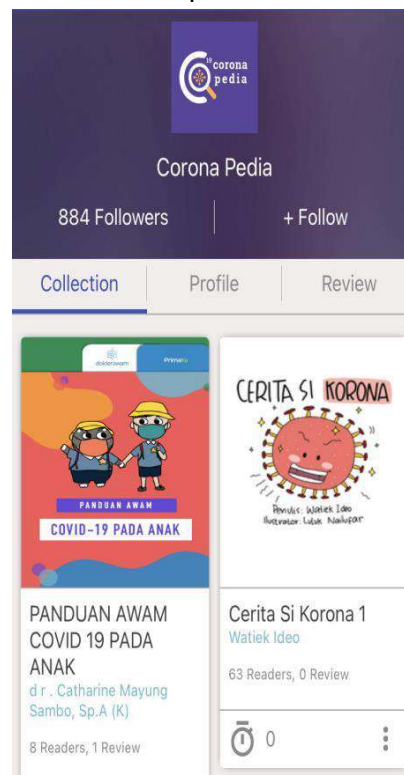
1. Indonesia *OneSearch* (IOS)

Indonesia *OneSearch* (onesearch.id) merupakan perwujudan perpustakaan digital dengan menghubungkan seluruh pangkalan data perpustakaan dan sumber elektronik di Indonesia. Indonesia *OneSearch* merupakan pintu untuk pencarian yang mengindeks pangkalan data perpustakaan dan sumber informasi. Indonesia *OneSearch* telah mengindeks 3.992 perpustakaan dan institusi dengan jumlah 9.020.481 unit entri dan 12.483.317 entri duplikat.

2. Aplikasi perpustakaan digital (iPusnas)

iPusnas merupakan perwujudan perpustakaan digital dengan menyediakan buku digital dalam negeri. Buku digital yang tersedia di iPusnas sebanyak 50.438 judul dan 591.793 salinan. iPusnas yang menggunakan teknologi DRM (*Digital Right Management*) dapat diunduh dan digunakan dalam *smartphone* dan komputer. iPusnas merupakan layanan penyediaan koleksi buku digital yang *full e-service*, artinya dari awal sampai akhir layanan bersifat elektronis tanpa diperlukan layanan luring.

Gambar 2. Tampilan Corona Pedia



iPusnas memuat *Corona Pedia*, ensiklopedia terkait informasi korona termasuk bahan-bahan perpustakaan (koleksi baik digital mau tercetak) tentang penyebaran virus Covid-19 (ePustaka). Hal ini untuk menjawab kondisi Indonesia yang sedang menghadapi virus Covid-19.

3. Layanan e-Resources

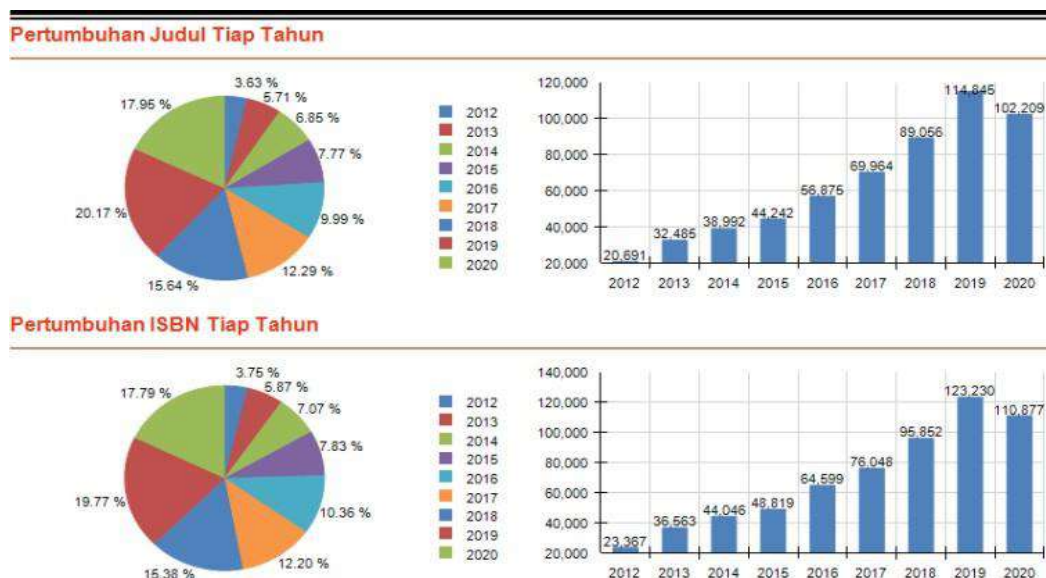
e-Resources (e-resources.perpusnas.go.id) merupakan perwujudan perpustakaan digital dengan menyediakan akses ke sumber digital internasional, seperti buku digital, jurnal ilmiah internasional, dan sumber referensi digital lainnya. e-Resources Perpustakaan Nasional terdiri dari 10 database dengan 605.078 judul. e-Resources sangat dibutuhkan oleh peneliti baik dari kalangan siswa, mahasiswa, dosen, dan peneliti itu sendiri untuk mendapatkan informasi dan

referensi yang komprehensif dan *update*. e-Resources merupakan layanan penyediaan koleksi buku dan jurnal ilmiah dan sumber digital internasional lainnya yang *full e-service*, artinya dari awal sampai akhir layanan bersifat elektronis tanpa diperlukan layanan luring.

4. Layanan *International Standard Book Number (ISBN) Online*

ISBN diberikan oleh Badan Internasional ISBN yang berkedudukan di London. Perpustakaan Nasional merupakan Badan Nasional ISBN yang berhak memberikan ISBN kepada penerbit yang berada di wilayah Indonesia dan KDT (Katalog Dalam Terbitan). Proses pendaftaran penerbit, permintaan ISBN dan KDT telah dibuat lebih mudah dengan layanan online. Sekali informasi judul terbitan diserahkan, akan menjadi bagian dari database bibliografi dan akan muncul di terbitan *Book in Print (BIP)* Katalog Dalam Terbitan di Perpustnas.

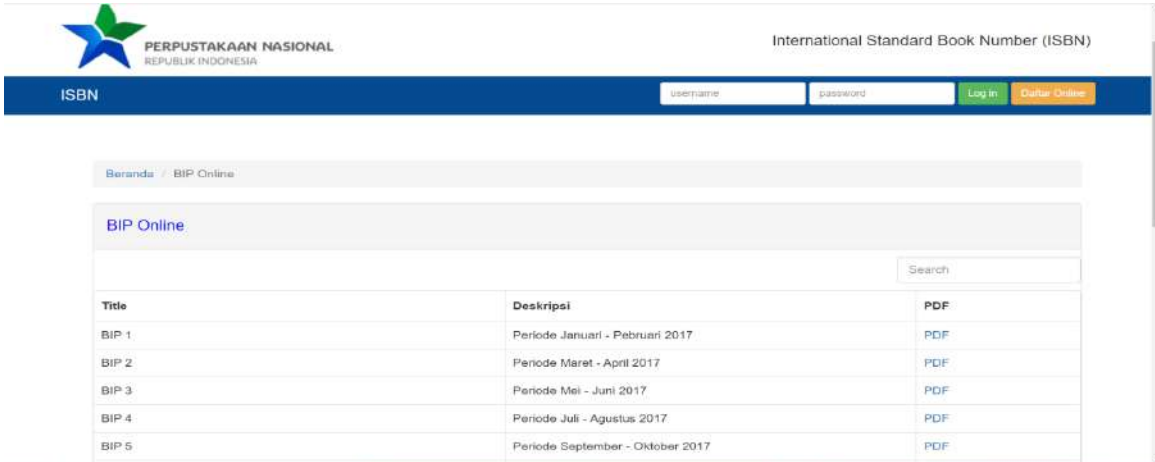
Berdasarkan database ISBN jumlah permohonan ISBN dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperti terlihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 3. Capaian ISBN 2012-2020

Books in print (BIP) atau daftar buku dalam proses cetak merupakan data buku yang diajukan oleh penerbit dan telah mendapatkan ISBN. Data tersebut diunggah pada website ISBN setiap dua bulan pada tahun berjalan. Pemustaka atau *stakeholder* (perpustakaan, peneliti, perguruan tinggi, dan lainnya) dapat mengunduh BIP secara gratis sesuai dengan kebutuhan masing-masing. BIP memungkinkan perpustakaan memanfaatkannya untuk proses

seleksi bahan perpustakaan dan bagi penerbit sebagai salah satu sarana promosi. Kegiatan BIP sudah dilaksanakan sejak tahun 2017.



The screenshot shows the BIP Online interface. At the top, there is a logo for PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA and the text 'International Standard Book Number (ISBN)'. Below the logo is a navigation bar with 'ISBN' and a search bar. The main content area is titled 'BIP Online' and contains a table with the following data:

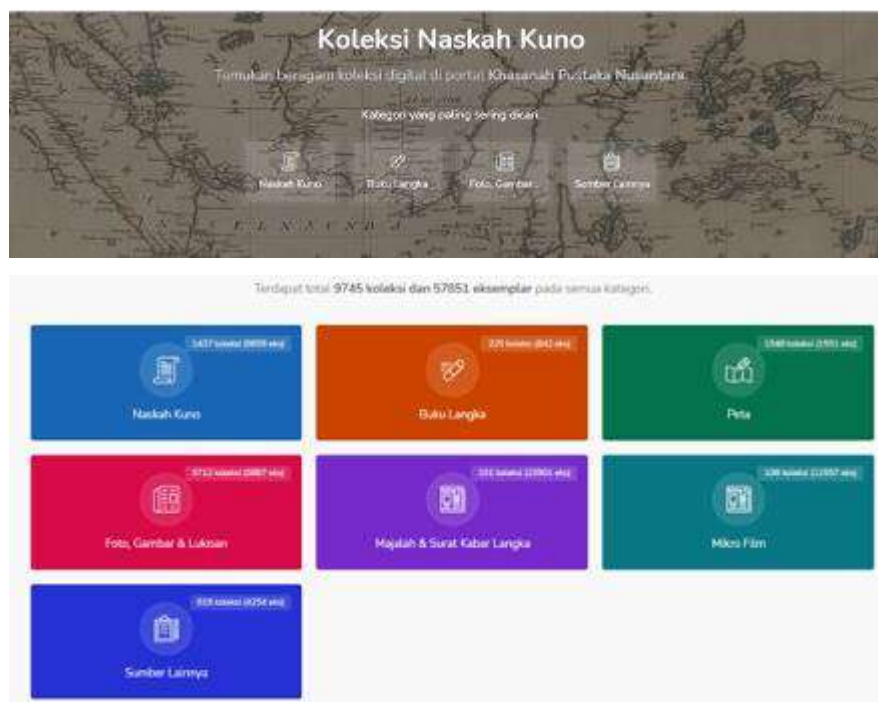
Title	Deskripsi	PDF
BIP 1	Periode Januari - Februari 2017	PDF
BIP 2	Periode Maret - April 2017	PDF
BIP 3	Periode Mei - Juni 2017	PDF
BIP 4	Periode Juli - Agustus 2017	PDF
BIP 5	Periode September - Oktober 2017	PDF

Gambar 3. Tampilan *Books in Prints*

Layanan ISBN juga melaksanakan bimbingan kepada penerbit secara online. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir tingkat kesalahan yang sering dilakukan oleh penerbit pada saat mempersiapkan berkas persyaratan permohonan ISBN, pengisian data pada website ISBN dan setelah mendapatkan ISBN. Penerapan *single account* (akun satu pintu) juga ditawarkan oleh layanan ISBN kepada penerbit

5. Layanan Khastara

Khastara (Khasanah Pustaka Nusantara) adalah layanan desiminasi koleksi nusantara yang khas berisi tentang koleksi warisan budaya Indonesia yang tersimpan dengan baik pada Perpustakaan Nasional. Koleksi tersebut berisi hasil digitalisasi karya cetak dan karya rekam yang terdiri dari naskah kuno, buku langka, peta, foto, gambar, lukisan, majalah, surat kabar dan sumber lainnya. Pengkayaan hasil alih media setiap tahunnya secara realtime akan langsung dapat diakses oleh pemustaka. Layanan akses yang diberikan kepada pemustaka pada Khastara tidak terbatas dengan koleksi yang langsung dapat diunduh dalam bentuk pdf.



Gambar 4. Tampilan Khastara

Melalui Khastara masyarakat diharapkan dapat berselancar dan mudah memperoleh informasi tentang budaya, sejarah, pendidikan, ilmu pengetahuan dari sumber literatur primer tersebut. Sejak Khastara dipublish hingga tahun 2020 jumlah pengunjung yang masuk sudah mencapai 103.934 orang dengan jumlah koleksi mencapai 9.746 judul koleksi. Pemanfaatan khastara sangat mudah dilakukan dengan jenis file pdf dengan kapasitas ringan dan dapat diunggah oleh masyarakat.

Tabel 7 Jumlah Koleksi Khastara per 7 Desember 2020

Jenis Koleksi	Jumlah Judul	Jumlah eksemplar
Naskah Kuno	1437	9859
Buku Langka	225	842
Peta	1548	1551
Foto, Gambar dan Lukisan	5712	5887
Majalah dan Surat Kabar	102	24082
Mikrofilm	106	11557
Sumber lainnya	616	4254
TOTAL	9746	58032

6. Tanya Pustakawan Virtual

Tanya pustakawan virtual atau *virtual ask a librarian* merupakan layanan yang memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bertanya kepada pustakawan referensi untuk pemenuhan kebutuhan informasi terkait data, informasi, dan bahan perpustakaan. Tanya pustakawan virtual dilakukan melalui media e-mail layanan_referensi@perpusnas.go.id dan melalui chat yang *widget*-nya tampil di sudut kanan bawah portal Perpustakaan Nasional RI.

Masyarakat antusias dengan layanan ini dengan didapatkan 2.182 pemustaka yang bertanya melalui e-mail dari Januari sampai dengan September 2020 dan 9.722 pemustaka yang bertanya melalui chat sejak diluncurkan pada pertengahan 17 Maret 2020 sampai dengan 20 Oktober 2020. Pertanyaan yang dikemukakan mayoritas merupakan pertanyaan penelusuran data, informasi, dan bahan pustaka.



Gambar 5. Widget Tanya Putakawan Virtual

1.5.2. Permasalahan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 belum maksimal

Sampai dengan tahun 2019, implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan belum rampungnya pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelaksana UU SSKCKR, sehingga belum tersedia regulasi yang secara terperinci mengatur tentang penyerahan KCKR, pembinaan dan sanksi administrasi bagi

penerbit, pengelolaan hasil SSKCKR, peran serta masyarakat, dan penghargaan kepada penerbit dan produsen karya rekam.

Belum tersedianya PP tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan penerbit dan produsen karya rekam dalam menyerahkan terbitannya. Saat ini tingkat kepatuhan penerbit dan produsen karya rekam pelaksana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 masih dalam level belum patuh. Level belum patuh didapatkan dengan membandingkan antara jumlah potensi terbitan dari seluruh penerbit dan produsen karya rekam yang ada di Indonesia dengan jumlah pelaksana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 pada pangkalan data penerimaan KCKR yang berhasil terhimpun. Potensi terbitan tersebut pada tahun 2019 adalah sejumlah 169.892 judul, sementara hasil pelaksanaan kewajibannya adalah sejumlah 71.476 judul. Perbandingan potensi dan hasil pelaksanaan kewajiban UU serah simpan oleh penerbit dan pengusaha rekaman dapat dilihat pada Grafik 4.



Grafik 4. Perbandingan Potensi Terbitan dan Pelaksanaan Kewajiban UU SS KCKR

Dalam RPP Pelaksana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 disebutkan bahwa salah satu dasar pemberian penghargaan kepada penerbit dan pengusaha rekaman adalah survei tingkat kepatuhan. Survei Tingkat Kepatuhan adalah sebuah penilaian dalam bentuk survei kesesuaian jumlah antara KCKR yang terbit di Indonesia, mengenai Indonesia, dan oleh orang Indonesia dengan yang tersimpan dan terkelola di Perpustakaan Nasional yang dapat dijadikan landasan bagi pengukuran tingkat kepatuhan dari para pelaksanaan serah karya cetak dan karya rekam di seluruh Indonesia.

2. Kekurangan ruang penyimpanan koleksi KCKR

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam bagian ke tiga pasal 19 tentang Sarana dan Prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai: lahan; gedung; ruang; perabot; dan peralatan yang mana dalam hal ini harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

Berdasarkan survei kebutuhan ruangan deposit untuk penyimpanan koleksi KCKR hanya tersedia sampai 2020. Ketersediaan ruang penyimpanan koleksi KCKR akan menjamin kelestarian fisik dan isi bahan perpustakaan yang merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia. Perpustakaan Nasional belum menemukan skema yang paling cocok bagi anggaran pengadaan ruang depo penyimpanan baru untuk koleksi KCKR hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018.

Dari data kajian kebutuhan ruang, sarana penyimpanan koleksi dan SDM pengelola KCKR pada Direktorat Deposit Bahan Pustaka tahun 2018 jumlah ruangan yang belum terpakai untuk penyimpanan KCKR tinggal 365 m². Kebutuhan penambahan lokal ruangan diperkirakan sebesar 201, 8 m² per tahun dan kebutuhan rak per tahun mencapai 144 rak *double face* 10 ambal.

3. Pengolahan Koleksi Deposit

Perubahan struktur organisasi di Perpustakaan Nasional yang menggabungkan antara Sub Direktorat Deposit Bahan Pustaka dan Bidang Akuisisi menjadi Direktorat Deposit Bahan Perpustakaan, serta Sub Direktorat Bibliografi dan Bidang Pengolahan Bahan Pustaka menjadi Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan berimbas kepada koleksi Deposit yang berjumlah 170.000 judul belum dilakukan pengolahan ke dalam pangkalan data Perpustnas. Oleh karena itu, Pusat Bibliografi mendapatkan amanah untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Namun perlu dukungan anggaran khusus sehingga kegiatan tersebut dapat segera terselesaikan. penyelesaian koleksi deposit yang belum terolah, sebagai imbas perubahan struktur organisasi Perpustnas.

4. Pelestarian Naskah Nusantara dan *Memory of the World* (MOW)

Warisan budaya sangat bernilai tinggi pada masa kini dan untuk masa depan bagi dalam sebuah peradaban. Akses, pelestarian, dan pendidikan seputar warisan budaya sangat penting

bagi evolusi manusia dan budaya bangsa. Perpustakaan sebagai salah satu lembaga yang memiliki mandat untuk menjaga warisan budaya terutama dalam bentuk aset berwujud yang telah tertuang dalam karya tulis, karya rekam dan karya cetak berbagai media menjadikan hal tersebut sebuah tantangan besar dalam melestarikan dan desiminasinya. Mengingat jumlah karya cipta yang sangat besar dan masih tersebar diseluruh Indonesia bahkan di luar negeri

Perpustakaan hadir dengan fungsi pelestarian kekayaan khasanah budaya bangsa untuk melaksanakan preservasi bahan perpustakaan Indonesia baik fisik, informasi dan pengetahuan.

Bahan perpustakaan yang memiliki prioritas tertinggi karena nilainya adalah naskah kuno, yaitu semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Mengetahui kondisi naskah yang rapuh, berjamur, korosi tinta, sobek, dimakan serangga, berada pada lingkungan lembab dan panas sangat memungkinkan bahwa warisan tulis bangsa ini dapat dengan mudah hancur atau hilang dengan sendirinya. Potensi jumlahnya yang besar dan beragamnya naskah kuno nusantara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mengharuskan strategi pelestarian naskah daerah harus dilakukan secara komprehensif dan holistik. Perencanaan jangka panjang yang dilakukan secara bertahap akan dibakukan menjadi sebuah project grand desain pelestarian naskah nusantara dengan tujuan: (1) naskah kuno yang kita miliki dapat tetap bertahan dengan jangka waktu yang panjang di Indonesia; (2) generasi yang akan datang dapat mengetahui identitas dan pengetahuan masa lampau tentang berdirinya bangsa; (3) akses yang terbuka untuk eksplorasi isi informasi peradaban nenek moyang yang sangat relevan dimasa saat ini dan (4) tidak menghilangkan sumber sejarah utama dan tetap mempertahankan kebudayaan bangsa yang tertuang pada naskah kuno.

Kendala dalam pelestarian naskah kuno saat ini adalah jumlahnya yang tersebar hampir diseluruh Indonesia mengisi sejarah perjalanan dan budaya wilayahnya masing-masing. Upaya Perpustakaan RI ikut membantu masyarakat atau kelompok inklusi pelestari naskah dimana pengetahuan dan ketrampilan dalam menjaga dan merawat koleksi naskah kuno masih sangat minim. Latar belakang mudahnya kerusakan karena kondisi lingkungan yang buruk dan betapa besar nilai naskah sebagai identitas bangsa merupakan faktor utama untuk strategi selanjutnya Perpustakaan RI dapat terjun langsung membantu para pemilik naskah.



Gambar 6. Sebaran Pelestarian Naskah Daerah per 2019

Sampai dengan tahun 2019 pelestarian naskah daerah telah mencapai output ribuan eksemplar pada berbagai wilayah seluruh Indonesia dengan jumlah mencapai 250 eksemplar per kegiatan pelestarian naskah daerah dengan sebaran hampir diseluruh wilayah Indonesia. Ketiadaan data tentang kantung naskah dan kondisi kerusakannya saat ini sangat mempersulit untuk melakukan pemetaan dan target pelestarian dalam jangka waktu panjang.

Sebaran pelestarian naskah daerah yang saat ini dilakukan masih terfokus pada pulau Jawa dan Sumatera dikarena jumlah kantong naskah terbanyak pada wilayah tersebut. Sebagai bentuk kinerja penunjang dalam melestarikan khasanah budaya bangsa pada tahun 2017 Perpustakaan Nasional telah berhasil membawa naskah kuno Cerita Panji menjadi salah satu benda budaya Ingatan Dunia (*Memory of the World*) yang dinobatkan oleh UNESCO.

Diperolehnya Cerita Panji sebagai Ingatan Dunia maka Perpustakaan Nasional RI telah menjadikan 3 (tiga) koleksi layanan khusus menjadi warisan budaya milik dunia dan harus dilestarikan baik fisik, informasi maupun dalam bentuk pengamalan nilai-nilai yang teruliskan pada koleksi tersebut. Dengan menjadi ingatan dunia itu juga berarti bahwa koleksi tersebut boleh diakses oleh masyarakat dunia dan Perpustakaan Nasional wajib menjaga dan merawatnya dengan baik. Program *Memory of the World* untuk menjadikan koleksi-koleksi Indonesia dikarenakan nilai sejarah antar bangsa yang saling terkait satu sama lain, budaya dan social masyarakat yang terbangun tertuang pada koleksi tersebut akan memperkaya khasanah dan ekpose pada dunia. Indonesia melalui Perpustakaan Nasional akan terus mempromosikan koleksi-koleksi naskah kuno maupun documenter yang bekerja sama dengan instansi dalam maupun luar negeri dengan cara mendaftarkan sebagai koleksi *Memory of the World*, melestarikan kondisi fisiknya, menyebarluaskan informasinya dengan alihmedia dan mengupas (renaisanse), menghidupkan kembali nilai yang ada pada koleksi tersebut.

5. Belum optimalnya pengembangan koleksi nasional

Indonesia dengan keberagaman masyarakatnya memiliki potensi besar dalam hal penerbitan berbagai informasi muatan lokal yang mengangkat nilai-nilai budaya asli Indonesia. Namun, selama ini upaya yang dilakukan Perpustakaan Nasional dalam menelusuri keberadaan terbitan muatan lokal tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena begitu luasnya wilayah Indonesia dan informasi mengenai keberadaan terbitan tersebut masih relatif terbatas.

Dari sisi ketersediaan bahan perpustakaan yang akan dijadikan sebagai koleksi Perpustakaan Nasional, potensinya untuk memperkuat koleksi nasional belum tergalang secara optimal. Misalnya saja sebagian besar penerbit buku di Indonesia belum memahami sepenuhnya potensi penerbitan buku digital dan masih menitikberatkan penerbitan buku dalam bentuk tercetak. Padahal potensi bisnis penerbitan buku digital cukup menjanjikan seiring dengan berkembangnya konsep layanan perpustakaan berbasis digital (*e-library*) di sejumlah wilayah di Indonesia. Konsep tersebut sangat membutuhkan konten informasi digital dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

Selain itu, semakin banyaknya penerbit yang mengalihkan penerbitannya ke bentuk digital menyebabkan semakin terbatasnya ketersediaan bahan perpustakaan dalam bentuk tercetak. Pada era informasi digital ini tidak sedikit penerbit di dalam negeri, khususnya dalam lingkup penerbitan media massa (majalah, jurnal, surat kabar, tabloid, dsb.), yang menghentikan penerbitan dalam bentuk tercetak dan sepenuhnya beralih ke penerbitan dalam bentuk digital. Di satu sisi hal ini memiliki pengaruh positif terhadap meningkatnya ketersediaan konten informasi digital dan memberikan berbagai kemudahan, namun di sisi lain berdampak pada berkurangnya akses masyarakat terhadap informasi dalam bentuk tercetak. Meskipun dewasa ini semakin banyak masyarakat yang memiliki kecenderungan mengakses informasi melalui perangkat digital, namun kebutuhan terhadap informasi dalam bentuk fisik/tercetak belum tergantikan sepenuhnya karena memiliki beberapa kelebihan tersendiri.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI

2.1. Visi Perpustakaan Nasional

Visi Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan Visi Presiden periode 2020-2024, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong: Melalui Penguatan Budaya Literasi”.

2.2. Misi Perpustakaan Nasional

Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan agenda ke-4 dari Agenda Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (RJPMN) 2020-2024, yaitu *revolusi mental dan pembangunan kebudayaan*. Berdasarkan agenda tersebut, Perpustakaan Nasional merumuskan misi berikut:

“Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara”.

2.3. Tujuan Pembangunan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi

Dalam upaya mewujudkan misi Perpustakaan Nasional, dirumuskan tujuan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi. Rumusan tujuan disesuaikan dengan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 dan fungsi yang tercantum dalam Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional. Tujuan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi adalah:

Terwujudnya Layanan Perpustakaan Prima melalui Pengembangan Bahan Perpustakaan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan

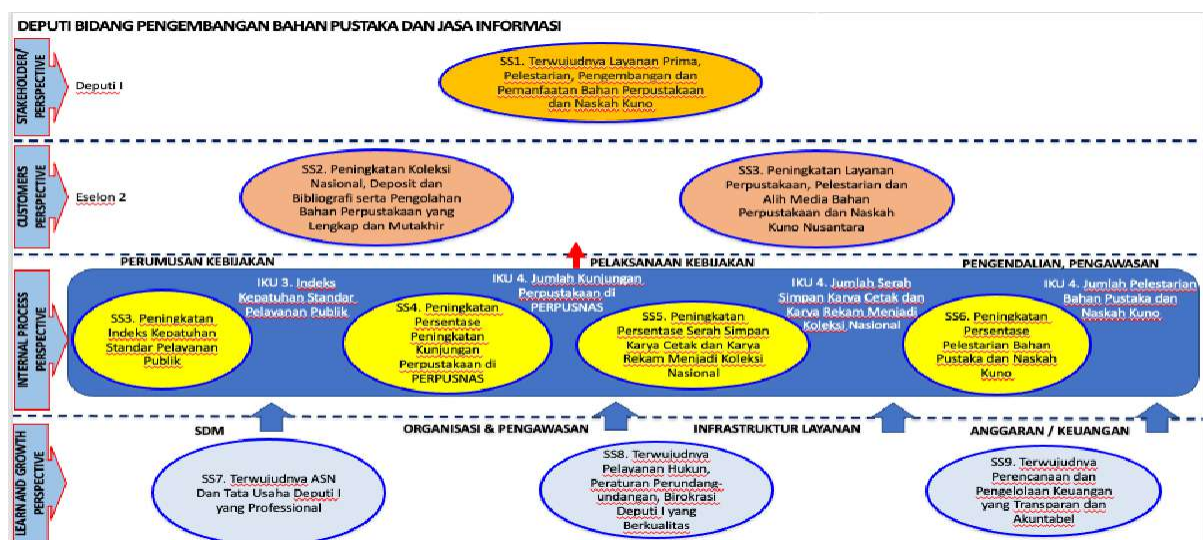
2.4. Sasaran Strategis Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi

Sasaran Strategis Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Tahun 2020-2024 diformulasikan sebagai berikut:

Terwujudnya Layanan Prima, Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara, dengan indikator:

- Kepatuhan standar pelayanan publik, dengan target sampai tahun 2024 sebesar 85 (nilai)
- Peningkatan kunjungan perpustakaan di Perpustakaan Nasional, dengan target kenaikan 0,5 % setiap tahun dari capaian tahun sebelumnya
- Peningkatan serah simpan karya cetak dan karya rekam, dengan target kenaikan 5 % setiap tahun dari capaian tahun sebelumnya
- Peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno, dengan nilai 18 % pada tahun 2019 dan menjadi 22,57% tahun 2024

2.5. Peta Strategis Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi



Gambar 7. SS1 Terwujudnya Layanan Prima, Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno

2.6. Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi

1. Stakeholder Perspective

SS1. Terwujudnya layanan prima, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan bahan perpustakaan dan naskah nusantara

IK1. Kepatuhan standar pelayanan publik

IK2. Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan di Perpustakaan

IK3. Persentase peningkatan serah simpan karya cetak dan karya rekam menjadi koleksi nasional

IK4. Persentase Peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno

2. Customer Perspective

SP1. Terselenggaranya layanan perpustakaan, pelestarian dan alih media bahan perpustakaan dan naskah nusantara./kuno

IK4. Indeks pelayanan publik

IK5. Tingkat kepuasan pemustaka

IK6. Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno

IK7. Persentase peningkatan bahan perpustakaan yang dialihmediakan

SP2. Peningkatan koleksi nasional, deposit dan bibliografi serta pengolahan bahan perpustakaan yang lengkap dan mutakhir

IK8. Persentase penambahan koleksi nasional perpustakaan yang lengkap

IK9. Persentase peningkatan jumlah koleksi KCKR yang terhimpun

IK10. Persentase peningkatan layanan ISBN dan ISMN

3. Internal Process Perspective

SK1. Terlaksananya layanan perpustakaan dan naskah nusantara/kuno

IK11. Persentase peningkatan alih aksara, alih bahasa dan penelitian naskah kuno

IK12. Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, pameran, dan desiminasi

IK13. Jumlah NSPK yang disusun

IK14. Jumlah pemustaka yang memanfaatkan layanan jasa informasi perpustakaan, koleksi langka, dan naskah nusantara

IK15. Jumlah pusat unggulan naskah nusantara

SK2.Terlaksananya layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Perpunas
IK16.Jumlah akses layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial
IK17.Tingkat kepuasan akses layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial

SK3.Terlaksananya konservasi bahan perpustakaan dan naskah kuno
IK18.Jumlah bahan perpustakaan yang dikonservasi
IK19.Jumlah naskah kuno yang dikonservasi

SK4.Terlaksananya alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno
IK20.Jumlah bahan perpustakaan yang dialihmediakan
IK21.Jumlah naskah kuno yang dialihmediakan
IK22.Jumlah pelestarian pusat unggulan naskah dan budaya etnis nusantara

SK5.Terlaksananya pengembangan koleksi
IK23.Jumlah dokumen kebijakan deposit dan pengembangan koleksi perpustakaan yang disusun
IK24.Jumlah bahan perpustakaan yang diadakan dan e-journal yang dilanggan
IK25.Jumlah naskah kuno yang diadakan

SK6.Terlaksananya serah simpan karya cetak dan karya rekam
IK26.Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang KKCR
IK27.Jumlah koleksi KCKR yang terhimpun
IK28.Jumlah pelaksanaan kegiatan forum

SK7.Terlaksananya layanan ISBN/ISMN dan penerbitan literatur sekunder
IK29.ISBN Dan ISMN yang diterbitkan
IK30.Jumlah literatur sekunder yang diterbitkan

SK8.Terlaksananya pengolahan bahan perpustakaan
IK31.Jumlah dokumen NSPK di bidang bibliografi dan pengolahan bahan perpustakaan
IK32.Jumlah bahan perpustakaan yang diolah

4. *Learning and Growth Perspective*

SK1.Tersedianya SDM yang kompeten dan profesional

IK33.Persentase SDM yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi di
Deputi I dan unit kerja yang dikoordinasikan

IK34.Rata-Rata Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Deputi I

SK2.Terkelolanya anggaran yang efektif dan efisien

IK35.Realisasi anggaran Deputi I

IK36.Temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

SK3.Tersedianya hasil evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan

IK37.Persentase evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA REGULASI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Perpustakaan Nasional

Arah kebijakan Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter, melalui:
 - a. Pengembangan dan pembinaan perpustakaan melalui akreditasi dan standarisasi semua jenis perpustakaan, modernisasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, penguatan perpustakaan melalui bantuan bahan perpustakaan dan layanan perpustakaan bergerak melalui mobil perpustakaan keliling digital dan motor perpustakaan keliling.
 - b. Implementasi kebijakan dan pengkajian perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi melalui gerakan sosial literasi, penguatan influencer literasi baik duta baca, tokoh masyarakat dan agama serta public figure;
 - c. Peningkatan tenaga perpustakaan dan pegiat literasi yang kompeten sebagai pengelolaan perpustakaan dan pendamping literasi;
 - d. Penguatan sistem informasi perpustakaan yang terpadu, dan inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk pengembangan jejaring nasional perpustakaan.
2. Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan bahan perpustakaan dan naskah nusantara bagi terwujudnya kemajuan kebudayaan untuk memperteguh jati diri bangsa, melalui :
 - a. Peningkatan koleksi nasional, deposit dan bibliografi serta pengolahan bahan perpustakaan yang lengkap dan mutakhir
 - b. Peningkatan pelestarian dan alih media bahan perpustakaan dan naskah nusantara/kuno

3. Peningkatan tata kelola dan manajemen Perpustakaan Nasional RI yang baik dan andal, melalui:
 - a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern Perpustakaan Nasional yang andal, efektif dan berintegritas;
 - b. Terwujudnya pelayanan hukum, kemitraan, tata laksana organisasi yang berkualitas;
 - c. Terwujudnya Aparat Sipil Negara dan ketatausahaan Perpustakaan Nasional yang profesional;
 - d. Perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi

Arah kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan sasaran strategis tersebut yaitu :

1. Kepatuhan standar pelayanan publik, melalui:

Meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan produk hukum turunan dari Undang-Undang tersebut
2. Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan di Perpustnas, melalui:
 - a. Tersusunnya kebijakan teknis di bidang jasa informasi, layanan perpustakaan, dan pengelolaan naskah nusantara
 - b. Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan layanan informasi dan promosi
 - c. Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan layanan referensi, sirkulasi, dan layanan ekstensi
 - d. Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang jasa informasi, layanan perpustakaan, dan pengelolaan naskah nusantara
 - e. Terlaksananya pengelolaan dan pendayagunaan naskah nusantara
3. Persentase peningkatan serah simpan karya cetak dan karya rekam menjadi koleksi nasional
 - a. Tersusunnya kebijakan teknis di bidang deposit dan pengembangan koleksi perpustakaan
 - b. Terlaksananya pengembangan koleksi nasional dan pengelolaan KCKR

4. Persentase Peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno
 - a. Tersusunnya dan terlaksananya kebijakan teknis di bidang pelestarian fisik bahan perpustakaan
 - b. Tersusunnya dan terlaksananya kebijakan teknis di bidang pelestarian informasi bahan perpustakaan

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi perlu didukung regulasi yang memadai yang dapat diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Perpustakaan Nasional, Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang terkait pengembangan bahan perpustakaan dan jasa informasi. Rincian peraturan perundang-undangan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
2. Peraturan Perpustakaan Nasional tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; dan
3. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional
4. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi

Target kinerja yang telah ditetapkan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi merupakan kondisi yang akan dicapai dan diharapkan membawa pengaruh atau dampak (*outcome/impact*) bagi terwujudnya layanan prima yang dilihat dari *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective* dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :

Tabel 8. Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan

SASARAN STRATEGIS, SASARAN PROGRAM, SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
SS. Terwujudnya Layanan Prima, Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara	IK1. Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	75,5	78,5	89,0	82,0	85,0
	IK2. Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan di PERPUSNAS	Persen	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
	IK3. Persentase Peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menjadi Koleksi Nasional	Persen	5	5	5	5	5
	IK4. Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	Persen	18,43	18,43	19,79	21,18	22,57

CUSTOMER PERSPECTIVE							
SP1. Terselenggaranya Layanan Perpustakaan. Pelestarian dan Alih Media Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara/ Kuno	IK5. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,8	3,85	3,91	3,91	4,01
	IK6. Tingkat kepuasan pemustaka	Nilai	80	82	84	86	88
	IK7. Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	Persen	8,83	9,53	10,07	10,77	11,47
	IK8. Persentase Peningkatan Bahan Perpustakaan yang di Alih Mediakan	Persen	8,21	8,9	9,72	10,41	11,1
SP2.Terselenggaranya Peningkatan Koleksi Nasional, Deposit dan Bibliografi serta Pengolahan Bahan Perpustakaan yang Lengkap dan Mutakhir	IK9. Persentase Penambahan Koleksi Nasional Perpustakaan yang Lengkap	Persen	5	6	7	8	9
	IK10. Persentase peningkatan jumlah koleksi KCKR yang terhimpun	Persen	5	5	5	5	5
	IK11. Persentase peningkatan layanan ISBN dan ISMN	Persen	5	5	5	5	5
SK1. Terlaksananya Layanan Perpustakaan dan Naskah Nusantara/ Kuno	IK12.Persentase peningkatan alih aksara, alih bahasa dan penelitian naskah kuno	Persen	0,16	0,61	1,00	1,40	1,90
	IK13. Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, pameran, dan desiminasi	Orang	5.145	5.448	5.920	6.216	6.527
	IK14.Jumlah NSPK yang disusun	NSPK	10	10	10	10	10
	IK15.Jumlah pemustaka yang memanfaatkan Layanan Jasa Informasi Perpustakaan, Koleksi Langka dan Naskah Nusantara	Orang	7.400.259	7.575.175	7.688.800	7.842.573	8.038.633

	IK16.Jumlah Pusat Unggulan Naskah Nusantara	Lembaga		1	6	6	6
SK2. Terlaksananya Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Perpusnas	IK17.Jumlah Akses Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Orang	1.672	1.837	1.990	2.150	2.320
	IK18.Tingkat Kepuasan Akses Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Nilai	80	82	84	86	88
SK3. Terlaksananya konservasi bahan perpustakaan dan naskah kuno	IK19.Jumlah bahan perpustakaan yang dikonservasi	Eksemplar	31.013	31.015	38.213	40.915	42.164
	IK20.Jumlah naskah kuno yang dikonservasi	Eksemplar	815	835	810	820	850
SK4. Terlaksananya alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno	IK21.Jumlah bahan perpustakaan yang dialihmediakan	Eksemplar	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	IK22. Jumlah naskah kuno yang dialihmediakan	Eksemplar	25.110	28.501	31.666	34.340	38.448
	IK23.Jumlah Pelestarian Pusat Unggulan Naskah dan Budaya Etnis Nusantara	Lembaga		1	6	6	6
SK5. Terlaksananya pengembangan koleksi	IK24.Jumlah Dokumen Kebijakan Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan yang disusun	Dokumen	4	6	6	6	6
	IK25.Jumlah bahan perpustakaan yang diadakan dan e-Journal yang dilanggan	Eksemplar	474.657	533.904	627.887	684.396	746.381

	IK26.Jumlah naskah kuno yang diadakan	Eksemplar	128	200	214	231	252
SK6. Terlaksannya serah simpan karya cetak dan karya rekam	IK27.Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang KCKR	Orang	900	925	950	975	1.0000
	IK28.Jumlah koleksi KCKR yang terhimpun	Eksemplar	347.723	367.500	385.875	405.169	425.428
	IK29.Jumlah pelaksanaan kegiatan forum	Forum	1	1	1	1	1
SK7. Terlaksannya layanan ISBN/ISMN dan penerbitan literatur sekunder	IK30.ISBN dan ISMN yang diterbitkan	Nomor	80.000	84.000	88.200	92.610	97.241
	IK31.Jumlah Literatur Sekunder Yang Diterbitkan	Naskah	9	9	9	9	9
SK8.Terlaksananya pengolahan bahan perpustakaan	IK32.Jumlah Dokumen NSPK Bidang Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Dokumen	8	8	8	8	8
	IK33.Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Diolah	Eksemplar	48.000	52.800	58.080	63.888	70.276
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE							
SK1. Tersedianya SDM yang kompeten dan profesional	IK34.Persentase SDM yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi di Deputi I dan unit kerja yang dikoordinasikan	Persen	>10	>10	>10	>10	>10
	IK35.Rata-rata nilai sasaran kinerja pegawai (SKP) di Deputi I	Nilai	81	82	83	84	85

SK2. Terkelolanya anggaran yang efektif dan efisien	IK36. Realisasi anggaran Deputy I	Persen	98	98	98	98	98
	IK37. Temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100
SK3. Tersedianya hasil evaluasi dan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	IK38. Persentasi evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun	Persen	100	100	100	100	100

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam memenuhi target kinerja Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Perpustakaan Nasional sesuai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan program serta kegiatan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pengembangan perpustakaan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan DAK). Pendanaan Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Perpustakaan Nasional akan memanfaatkan sebesar-besarnya alokasi anggaran yang bersumber dari APBN untuk pengembangan perpustakaan di Indonesia dan untuk membangun budaya membaca masyarakat.

Tabel 9. Alokasi Anggaran Perpustnas Berdasarkan Program

Kode	Program	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	PERPUSTAKAAN NASIONAL	454.777,2	650.139,8	869.353,8	948.070,9	1.037.186,6
057.D M	Program Perpustakaan dan Literasi	256.847,5	420.402,4	555.151,3	608.555,8	658.826,9

BAB V

PENUTUP

Renstra Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Perpustakaan Nasional "Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (Baseline 2019) menjadi 71,0 tahun 2024". Oleh karena itu Rencana Strategis Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi disusun dengan memperhatikan sasaran strategis Perpustakaan Nasional yaitu "Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca", dengan indikator:

- Nilai kegemaran membaca dari 53.84 (Baseline 2019) menjadi 71,30 tahun 2024.
- Indeks pembangunan literasi masyarakat dari 10,2 (Baseline 2019) menjadi 15,00 tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut

:

1. Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi tahun 2020-2024.
2. Renstra Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi.
3. Penguatan peran Pemangku Kepentingan perlu dilakukan dan ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan rencana strategis Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi tahun 2020-2024 dan rencana kerja Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi. Penguatan peran ini salah satunya dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi/pemasyarakatan/advokasi dan bimbingan teknis, baik kepada masyarakat maupun instansi atau lembaga, serta seluruh komponen pendukung lainnya di lingkungan pemerintahan.

4. Renstra Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi tahun 2020-2024 ini juga digunakan sebagai dasar monitoring dan evaluasi serta laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan/atau lima tahunan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan agar renstra dapat dijalankan secara efektif dan efisien.
5. Renstra Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi tahun 2020-2024 ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi serta bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi segala kemungkinan tantangan/kendala yang akan dihadapi serta melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lampiran 1

Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi

1. Matriks Kinerja

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI			SATUAN TARGET	TARGET				
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020		2021	2022	2023	2024	
<i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>								
1 Terwujudnya Layanan Prima, Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara	1 Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	75.5	78.5	80.0	82.0	85.0	
	2 Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan di PERPUSNAS	%	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	
	3 Persentase Peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menjadi Koleksi Nasional	%	5	5	5	5	5	
	4 Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	%	18.43	18.43	19.79	21.18	22.57	
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>								
2 Terselenggaranya Layanan Perpustakaan. Pelestarian dan Alih Media Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara/Kuno	5 Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.8	3.85	3.91	3.97	4.01	
	6 Tingkat kepuasan pemustaka	Nilai	80	82	84	86	88	
	7 Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	Persen	8.83	9.53	10.07	10.77	11.47	
	8 Persentase Peningkatan Bahan Perpustakaan yang di Alih Mediakan	Persen	8.21	8.9	9.72	10.41	11.1	
3 Terselenggaranya Peningkatan Koleksi Nasional, Deposit dan Bibliografi serta Pengolahan Bahan Perpustakaan yang Lengkap dan Mutakhir	10 Persentase Penambahan Koleksi Nasional Perpustakaan yang Lengkap	Persen	5	6	7	8	9	
	11 Persentase peningkatan jumlah koleksi KCKR yang terhimpun	Persen	5	5	5	5	5	

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI			SATUAN TARGET	TARGET					
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			2020	2021	2022	2023	2024	
		12	Persentase peningkatan layanan ISBN dan ISMN	Persen	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>									
4	Terlaksananya Layanan Perpustakaan dan Naskah Nusantara/Kuno	13	Persentase peningkatan alih aksara, alih bahasa dan penelitian naskah kuno	Persen	0.16	0.61	1.00	1.40	1.90
		14	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, pameran, dan desiminasi	Orang	5145	5448	5920	6216	6527
		15	Jumlah NSPK yang disusun	NSPK	10	10	10	10	10
		16	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan Layanan Jasa Informasi Perpustakaan, Koleksi Langka dan Naskah Nusantara	Orang	7400259	7575175	7688800	7842573	8038633
		17	Jumlah Pusat Unggulan Naskah Nusantara	Lembaga	0	1	6	6	6
5	Terlaksananya Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Perpusnas	18	Jumlah Akses Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Orang	1672	1837	1990	2150	2320
		19	Tingkat Kepuasan Akses Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Nilai	80	82	84	86	88
6	Terlaksananya konservasi bahan perpustakaan dan naskah kuno	20	Jumlah bahan perpustakaan yang dikonservasi	Eksemplar	31013	31015	38213	40915	42164
		21	Jumlah naskah kuno yang dikonservasi	Eksemplar	815	835	810	820	850
7	Terlaksananya alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno	22	Jumlah bahan perpustakaan yang dialihmediakan	Eksemplar	6000	6000	6000	6000	6000
		23	Jumlah naskah kuno yang dialihmediakan	Eksemplar	25110	28501	31666	34340	38448
		24	Jumlah Pelestarian Pusat Unggulan Naskah dan Budaya Etnis Nusantara	Lembaga	0	1	6	6	6
8	Terlaksananya pengembangan koleksi	25	Jumlah Dokumen Kebijakan Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan yang disusun	Dokumen	4	6	6	6	6
		26	Jumlah bahan perpustakaan yang diadakan dan e-Journal yang dilanggan	Eksemplar	474657	533904	627887	684396	746381
		27	Jumlah naskah kuno yang diadakan	Eksemplar	128	200	214	231	252
9	Terlaksananya serah simpan karya cetak dan karya rekam	28	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang KCKR	Orang	900	925	950	975	1000
		29	Jumlah koleksi KCKR yang terhimpun	Eksemplar	347723	367500	385875	405169	425428
		30	Jumlah pelaksanaan kegiatan forum	Forum	1	1	1	1	1
10		31	ISBN dan ISMN yang diterbitkan	Nomor	80000	84000	88200	92610	97241

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI			SATUAN TARGET	TARGET					
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			2020	2021	2022	2023	2024	
	Terlaksannya layanan ISBN/ISMN dan penerbitan literatur sekunder	32	Jumlah Literatur Sekunder Yang Diterbitkan	Naskah	9	9	9	9	9
11	Terlaksananya pengolahan bahan perpustakaan	33	Jumlah Dokumen NSPK Bidang Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Dokumen	8	8	8	8	8
		34	Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Diolah	Eksemplar	48000	52800	58080	63888	70276
<i>LEARNIG AND GROWTH</i>									
14	Tersedianya SDM yang kompeten dan profesional	43	Persentase SDM yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi di Deputi I dan unit kerja yang dikoordinasikan	Persen	>10%	>10%	>10%	>10%	>10%
		44	Rata-rata nilai sasaran kinerja pegawai (SKP) di Deputi I	Nilai	81	82	83	84	85
15	Terkelolanya anggaran yang efektif dan efisien	45	Realisasi anggaran Deputi I	Persen	98	98	98	98	98
		48	Temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100
16	Tersedianya hasil evaluasi dan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	49	Persentase evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun	Persen	100	100	100	100	100

2. Matriks Pendanaan

Kode	Program	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	PERPUSTAKAAN NASIONAL	454.777,2	650.139,8	869.353,8	948.070,9	1.037.186,6
057.DM	Program Perpustakaan dan Literasi	256.847,5	420.402,4	555.151,3	608.555,8	658.826,9

Lampiran 2

Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kebijakan Regulasi	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam					
2	Peraturan Perpustakaan Nasional tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam					
3	Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional					
4	Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi					